

4	Persentase peningkatan produk pangan lokal	pangan dan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat serta penanganan daerah rawan pangan	minimal 2.400 Kg/Perkapita/Hari dan Protein sebesar 63 gram/perkita/hari	nasional
5	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan		4. Stabila harga pangan pokok dan strategis di tingkat produsen dan konsumen	
6	Prevalensi Harga pangan		5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPPD) beras dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan pangan	
7	Persentase pengawasan dan keamanan pangan	3. Meningkatkan Ketersediaan pangan 4. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan	6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang B2SA	
8	Indeks Pelayanan Instansi			
9	Nilai AKIP	5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah menuju kelola dan akuntabilitas layanan pemerintah yang professional		
10	Nilai Laporan Keuangan			

3.4. Telaahan RT/RW dan KLHS RPJMD

RTRW merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Tabel 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan sudah menjadi masalah global, ancaman krisis pangan	Pengaruh alam yang sangat besar akibat banjir dan intuisi air laut pada sebagian besar lahan pertanian tanaman pangan	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang cukup
		Program, kegiatan ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan sementara alih fungsi lahan pertanian semakin luas	Saat ini nilai jual komoditi perkebunan (kelapa sawit / karet) sangat menjanjikan/harga jual yang sangat tinggi dibandingkan harga pangan	Dukungan dana Bansos untuk pengembangan pangan serta bantuan bibit/benih dan pupuk dari instansi teknis terkait
		Dinas Ketahanan Pangan fungsinya bukan teknis tetapi fungsinya hanya koordinasi (non teknis)	Akibat fungsinya sebatas koordinasi maka dalam penyampaian informasi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat	Adanya dukungan dana Bansos untuk penguatan modal kelompok baik kelompok tani maupun Gapoktan
		Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengolahan pangan lokal sumber karbohidrat non beras Sulitnya menghilangkan kebiasaan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi makanan siap saji	<ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan budidaya dan pengolahan masih ..kurang - Sebagian lahan pekarangan sering terendam air ..pasang - Kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi ..makanan siap saji 	<p>Potensi lahan pekarangan cukup luas Produksi dari tanaman pekarangan khususnya sayuran masih didatngkan dari luar daerah</p> <p>Adanya Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk menganalisis kandungan zat kimia yang membahayakan di dalam makanan</p>

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah masih terjadinya :

- a. Ketersediaan Pangan Strategis masih belum mencukupi dan sebagian cenderung menurun
- b. Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat di beberapa Wilayah /desa masih rawan
- c. Fluktuasi Harga Pangan Masih cukup Tinggi
- d. Terbatasnya Distribusi pokok pangan masyarakat
- e. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan masyarakat masih belum memenuhi standar pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- f. Masih rendahnya sebaagian cakupan gizi masyarakat
- g. Masih di temui produk pangan yang berbahaya dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan di masyakat
- h. Belum Optimalnya Jumlah cadangan Pangan Daerah.

Secara umum kiat dalam menghadapi masalah tersebut diatas adalah melalui :

- a) Pelaksanakan koordinasi secara terintegrasi, sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
- b) Pengembangan cadangan pangan, sistem rantai pasok-logistik-distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
- c) Akselerasi peran serta swasta, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan;
- d) Penyelenggaraan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
- e) Sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota serta dana masyarakat;
- f) Mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan dan wawancara dengan petani serta sumber-sumber lainnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ;

2. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan B2SA;
3. Kemampuan akses pangan masyarakat belum maksimal ;
4. Fluktuasi harga pangan yang menyebabkan aksesibilitas masyarakat terganggu;
5. Harga sarana produksi dan biaya lainnya meningkat lebih tinggi dibandingkan harga/nilai produksi pangan yang dihasilkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan yang dituangkan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000 serta Dasar Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016.

Tujuan harus mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Selanjutnya secara prinsipil tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 – 2026 Yaitu:

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

5.2. Sasaran

adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas ketahanan pangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021– 2026 adalah :

1. Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat ;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Fokus utama dalam penentuan sasaran ini adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan Organisasi. Sasaran dan target sasaran tahunan sedangkan pengukurannya melalui tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Untuk kinerja kegiatan dapat diukur melalui tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah
Indikator Kinerja utama
abupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Sasaran Pada tahun ke-						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2			4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	72,21	72,5	73	73,5	74	74,5	Data Badan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	BPS	2.125	2.130	2.135	2.140	2.145	2.150	BPS	Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan , Bidang Distribusi pangan Serta bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
			Skor PPH	BPS	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2	BPS	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	78	82	86	90	94	98	Surpey menurut Permenpan No.14	Disketpang/ Sekretariat
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	BB	BB	BB	BB	Dokumen Renstra, Renja , DPA, LKPJ	Disketpang/ Sekretariat
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Permendagri 77 Tahun 2021	Disketpang/ Sekretariat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

A. STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Dinas Ketahanan Pangan.

1. Identifikasi lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan

a. Kekuatan (strengths) Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sehingga mampu melakukan semua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu berupa potensi yang dapat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan produk perundang-undangan
- Adanya program kerja, kegiatan dan dana
- Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat

b. Kelemahan (weaknesses) Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
- Sarana dan prasarana belum memadai
- Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid

2. Identifikasi Lingkungan Eksternal Dinas Ketahanan Pangan Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek-aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan

di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan tugas di luar tugas dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan .

a. Peluang (Opportunities) Peluang yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Tersedianya potensi sumber daya alam
- Peluang pasar yang masih besar
- Peran aktif masyarakat

b. Ancaman / Tantangan (Threats) Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan upaya diverifikasi pangan dan keamanan pangan
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA
- Masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemantauan ketersediaan pangan, distribusi dan stabilitas harga, pembinaan Mutu dan keamanan Pangan serta koordinasi lintas sektor ketahanan pangan .
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Meningkatnya Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
2. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan;
3. Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah
4. Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan ;
5. Penyediaan stock cadangan pangan daerah;
6. Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan
7. Peningkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	1 Meningkatkan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
				Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	

3	Meningkatkan Sarana prasarana infrastruktur Lumbung Pangan dan sarana pendukungnya serta penguatan cadangan pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
4	Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan/ olahan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Program Pengawasan dan Keamanan pangan
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis								

2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Renstra PD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dinas yang mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan selama kurun waktu lima tahun

Program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung jabung Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Sumber Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Daerah rawan pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disajikan **dalam lampiran**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, maka telah menyusun indikator kinerja yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel VII
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.119	2.125	2.130	2.135	2.140	2.145	2.150	2.150
2	Skor PPH	93,1	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2	93,2
3	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	98,92	93,55	94,62	95,7	96,77	97,85	100	100
4	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan	NA	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100	100
5	Persentase pengawasan dan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	NA	78	82	86	88,3	89	90	90
7	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	B
8	Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	82	86	88,3	89	90	90

Tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran yang ingin di capai adalah Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan) dan Peningkatan Pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan. Untuk mencapai target Indikator Kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan yang didukung oleh 5 (Lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 42 (Empat puluh dua) subkegiatan .

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima (5) tahun (2021 - 2026) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga upaya Dinas Ketahanan Pangan dapat lebih terarah dan terukur dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021 – 2026.

Penyusunan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021–2026 melibatkan lintas program terkait baik pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini diucapkan terima kasih, tentunya RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021– 2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya apabila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan lintas sektoral terkait serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak
Kepala Dinas Ketahanan Pangan



FAJAR ALAMSYAH, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19801122 200604 1 009

Tabel II
Kemasa Program, Kegiatan dan Fondasi Perangkat Daerah Sesuai Pelaksanaan Anggaran
Kabupaten "Anjang-Jelajah" Tahun 2023-2026

Hal 1

No	Uraian	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Inisiatif dan Kegiatan) (Output)	Capaian Kinerja Awal (31/03/2023)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Berkas Kinerja pada akhir periode (31/03/2023)		Dit Kerja Perangkat Daerah Pemangkas Anggaran	Lain					
							2023		2024		2025		2026		2027		Kinerja	Rp Bilai	Kinerja	Rp Bilai							
							Kinerja	Rp Bilai	Kinerja	Rp Bilai	Kinerja	Rp Bilai	Kinerja	Rp Bilai	Kinerja	Rp Bilai											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Misi 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																											
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				1 Nilai RW (Indeks Kepuasan Masyarakat)	77.3 %	78%		82%		86%		88.30%		89%		90%		93%					Diras Ketahanan Pangan		
						2 Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	60.18	65		66		67		68		69		70		70							
						3 Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	sesuai	sesuai		Sesuai		Sesuai		0 sesuai		sesuai		Sesuai		sesuai							
			2.09.01	Program Peningkat Urusan Pemintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	77.3 %	78%	88.30%	3,552,432,840	82.00%	3,842,754,723	86.00%	3,634,130,214	88.30%	3,798,774,397	89.00%	3,998,573,880	90%	4,127,552,062	93%	23,014,400,315						
			2.09.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Keefektifan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	100 %	100	100	13,821,300	100	22,151,000	100	18,400,000	100	23,000,000	100	29,620,756	100	30,500,000	100	149,693,066						
			2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok	2	1,100,000	2	2,400,000											1,500,000						
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0 Dok					2	1,100,000	2	1,500,000.00	2	2,000,000	3	2,200,000	3	6,800,000							
			2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen REA-SKPD	Jumlah Dokumen REA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen REA-SKPD (Dok)	0 Dok	0			1	1,981,000	1	1,000,000	1	1,200,000.00	1	1,300,000	1	1,400,000	5	6,281,000						
			2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan REA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan (DPA-SKPD) (Dok)	0 Dok	0			1	1,345,000	1	1,000,000	1	1,200,000.00	1	1,300,000	1	1,400,000	5	6,245,000						
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen pemusutan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi pemusutan Dokumen DPA-SKPD (Dok)	1 Dok	0			1	1,345,000	1	1,000,000	1	1,200,000.00	1	1,300,000	1	1,400,000	5	6,245,000									

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan				12	15,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	12	27,500,000	12	87,500,000	
2.05.01.2.05	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah	100	%	100	335,250,000	100	338,000,000	100	303,300,000	100	310,500,000	100/0%	327,999,999	100	371,800,000	100	1,031,049,999
2.05.01.2.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1	Laporan	260	2,250,000	500	3,000,000									760	7,250,000
		Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)						1	2,500,000.00	1	2,500,000.00	1	4,999,999.00	1	5,500,000.00	4	15,499,999	
2.05.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air/listrik (bulan)	24	Bulan	12	333,000,000	12	333,000,000									24	666,000,000
		Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	0	Laporan				1	300,000,000	1.00	333,000,000.00	1.00	333,000,000	1	366,300,000	4	1,332,300,000	
2.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100.00	134,560,000	100.00	146,470,000	100.00	128,000,000	100.00	140,343,969	100.00	184,000,000	100.00	192,000,000	100.00	668,293,969
2.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang dipelihara	10	Unit	10	111,840,000	10	111,040,000									10	223,880,000
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	0	Unit				10	100,000,000	11	125,000,000	12	135,000,000	13	140,000,000	13	500,000,000	
2.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	27	Unit	18	13,120,000	25	35,420,000	18	14,000,000	19	30,000,000	20	25,000,000	21	17,000,000	21	134,550,000
2.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Gedung	1	9,600,000	1	21,000,000									1	30,600,000
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi						1	10,000,000	1	20,163,969	1	14,000,000	1	25,000,000	1	78,163,969	
2.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0		0		100	27,990,935.00	0		100	30,000,000.00	100	33,000,000.00	100	33,000,000.00	100	132,980,935.00
2.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	0	Unit	0		1	20,000,000	0								1	20,000,000
		Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	0	Unit				0				1	20,000,000	1	21,000,000	1	41,000,000	

		Jumlah Kelengkapan dan jaringan distribusi pangan yang dilaksanakan						8	42.000.000	8	43.500.000	8	45.500.000	8	48.800.000	8	79.800.000	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelengkapan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah LUPM (Gepokan)	5	Gepokan	5	43.985.000	5.00	43.985.000									81.970.000	
		Jumlah Kelengkapan usaha pangan masyarakat dan toko Tani Indonesia (JAI)	0	Unit				5	43.500.000	5.00	44.000.000	5.00	44.000.000	5	44.000.000	5	90.900.000	
2.09.03.2.02	Pengadaan dan Keselengkapan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan Cadangan Pangan	100	%	100	29.874.800	100	29.874.800	100	40.176.200	100	43.976.779	100	52.328.441	100	67.000.000	100	254.431.042
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Biaya Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	1	Tahun	1	36.924.800	1.00	36.924.800									73.849.600	
		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan (Laporan)	0	Laporan				1	30.000.000	1.00	30.000.000	1.00	38.000.000	1	41.000.000	1	64.000.000	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah daerah	8.103.2	Kg													-	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-					1071	3.778.200		-	1030	11.334.441		-	170	19.304.441	
2.09.03.2.02.04	Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Outrig Pangan yang dipelihara	1	Gulung	1	2.950.000	1	2.950.000									5.900.000	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	0	Ton					3.000.000		8.594.779.00		4.001.000.00		6.000.000.00		21.816.779	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian target Konsumsi Pangan	100/100	%	100.0	295.706.205	100.0	296.903.704	100.0	322.861.744	100.0	339.364.193	100.0	349.034.901	100.0	362.977.080	100.0	3.081.748.021
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun (Dokumen)	Target Konsumsi Pangan perkapita pertahun (Dokumen)	0	Dok	1	81.644.400	1	89.721.900	1	72.999.356	1	75.563.431	1	77.561.711	1	79.277.206	1	576.887.308
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragama n Kearsafan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kader Pangan	477	Kader Pangan	400	59.686.955	500	20.277.376								500	270.944.299	
		Jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam penggerakragama n Kearsafan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)						1	206.848.588	1	204.701.258	1	223.443.790	1	232.279.886	4	677.273.530	

2.09.02.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja perkapita per tahun	Biaya Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perkapita Per tahun	1	Tahun	1	54,419,000		55,164,000									2	109,583,000
		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi kinerja perkapita per tahun (Laporn)	0	Laporn					43,000,000	1	44,000,000	1	46,000,000	1	51,000,000		4	187,000,000
2.09.04	Program penanganan Kawasan Pangan	% Penangan Daerah rawan Pangan	10,47	%	93,55	48,419,896	94,82	54,419,896	85,70	49,602,379	94,77	51,851,944,55	97,25	54,307,577	100	57,307,569	100	318,236,626,67
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta	100	%	100	21,999,848	100	26,999,848	100	24,999,847	100	25,943,797	100	27,088,076	100	28,051,994	100	109,233,510
2.09.04.2.01	Penyusunan, Pembaruan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta PSYA	0	Peta	1	23,999,848		26,999,848									2	52,999,696,00
		Peta dan Analisis Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan (Dokumen)							24,999,847,00	1	25,943,797,00	1	27,088,076,00	1	28,051,994,00		4	106,233,816,00
2.09.04.2.02	Penangan Kawasan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota	Persentase Penangan Kawasan Pangan	100	%	100	21,000,048	100	21,500,048	100	24,602,432	100	25,996,948	100	27,444,407	100	29,056,965	100	118,943,091
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penangan Kawasan Pangan Kabupaten/Kota	Biaya Koordinasi dan sinkronisasi penanganan Kawasan Pangan Kabupaten/Kota (Tahun)	1	Tahun	1	26,419,848	100	27,500,048									2	51,999,896,00
		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Penangan Kawasan Pangan Kabupaten/Kota (Laporn)							26,652,431,71	1	26,996,97,55	1	27,441,400,69	1	29,056,96,72		4	106,993,194,67
2.09.02	Program Penguasaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Rencobatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	87,16	%	86,26	489,770,724,00	71,63	589,770,724,00	78,97	423,758,880,47	85,71	452,098,275,03	92,86	486,371,645,34	100,00	718,744,256,77	100,00	#####
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Ketersediaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	100,00	%	100,00	489,770,724,00	100,00	589,770,724,00	100,00	423,758,880,47	100,00	452,098,275,03	100,00	486,371,645,34	100,00	718,744,256,77	100,00	#####
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibartayakan	12	Lumbung Pangan	13	130,958,000	14	159,770,000									14	648,725,000
		Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia (SDG)							16	341,000,000	16	400,000,000	17	400,000,000	18	430,000,000	18	1,571,000,000
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur	12	Lantai Jemur	13	34,815,000	14	25,000,000	16	100,000,000	16	100,000,000	17	50,000,000	18	160,000,000	18	641,815,000
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lantai	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	2	Paket	2	-		3	181,000,000	3	187,000,000	3	197,000,000	3	207,000,000	3	215,000,000	

2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemudahan Pangan	Terpetakkanya potensi pengembangan komoditas Pertanian/peta SDP	0	Dok	1	22.000.724	1	28.000.724							2	47.001.448.00	
		Jumlah Rencana dan Peta Jalan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung kemudahan pangan					1	32.754.840.47	1	35.018.276.10	1	37.000.000.34	1	50.000.000.77	4	84.777.04.10	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	S. Pengawasan dan Pemantauan Keamanan	100	%	100	4.029.400	100.00	31.040.000	100.00	4.121.834.47	100.00	4.308.574.26	100.00	4.535.184.81	100.00	52.804.149.85	
2.09.05.20	Pelaksanaan Pengawasan keamanan Pangan Seger Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan PSAT dan pangan lainnya	100		100	4.029.400	100	31.040.000	100	4.121.834	100	4.308.574	100	4.535.184	100	52.804.149	
2.09.05.20.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Seger Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel PSAT dan bahan pangan lainnya	69	Sampel	40	4.029.400	74	-							74	4.029.400.00	
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Seger Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	Dok				1	4.121.834	1	4.308.574	1	4.535.184.81	1	4.749.503	4	17.781.094.85
2.09.05.20.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Seger Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Seger Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						31.040.000								31.040.000.00	
Jumlah Page Revisi						4.610.260.083		4.795.527.795		4.929.403.835		5.143.322.864		5.410.814.651		5.669.478.791	30.742.471.700